

Health Outlook 2022:

Ubah Pola Penanganan Wabah Menjadi Lebih Berkeadilan untuk Selamatkan Nyawa dan Ekonomi

- CISDI memprediksi Indonesia akan berada pada skenario ***“Survival of the Fittest”*** di mana keberhasilan mengendalikan COVID-19 akan terjadi dengan terbatas dan perlahan, tetapi kelompok yang paling rentan masih tertinggal.
- CISDI mendorong 7 rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan penanganan pandemi COVID-19 pada 2022.

Jakarta, 27 Januari 2022 – Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mendorong pemerintah mengubah pola penanganan wabah menjadi berperspektif keadilan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi dan kesehatan. Perubahan pendekatan diharapkan membuat lebih banyak nyawa terselamatkan, meningkatkan kualitas hidup, dan ekonomi juga bisa pulih.

“Ketidakadilan (*inequity*) akses vaksin, masker, tes, dan ketimpangan kapasitas lacak kasus membunuh banyak orang pada 2021. Untuk dapat hidup berdampingan dengan COVID-19, penyakit ini harus berubah status menjadi penyakit endemik dengan mempertahankan jumlah kasus infeksi serendah mungkin tanpa memicu peningkatan angka kematian. Jika tidak, pengendalian COVID-19 akan bernasib sama seperti penyakit endemik lainnya di Indonesia, seperti DBD, malaria, tuberkulosis: Penyebaran tidak terkendali, kematian menetap, dan resistensi obat terus meningkat,” ujar Gatot Suarman Ilyas, Direktur Eksekutif CISDI.

Temuan masalah serta rekomendasi kebijakan kesehatan kepada pemerintah dituangkan CISDI melalui ***Health Outlook 2022: Habis Gelap, Terbitkah Terang?*** yang diluncurkan melalui acara diskusi publik ***Lokapala 3.0*** pada **Kamis, 27 Januari 2022**. ***Health Outlook 2022*** ditujukan sebagai referensi pemangku kepentingan nasional untuk menentukan prioritas perbaikan kebijakan kesehatan.

Setelah mengamati kinerja sistem kesehatan Indonesia pada 2021 dan memetakan berbagai tantangan yang muncul di tengah pandemi COVID-19, kami menyimpulkan kemungkinan besar Indonesia akan berada pada skenario ***“Survival of the Fittest”***, di mana keberhasilan mengendalikan COVID-19 akan terjadi dengan terbatas dan perlahan, namun menyisakan jurang ketimpangan yang cukup lebar.

Kasus baru bisa jadi merebak dalam kurun waktu tertentu di beberapa tempat dan endemi skala lokal akan terjadi di tempat dengan tingkat penularan tinggi. Sebagai akibat kebijakan yang berpihak pada mereka yang telah punya kemampuan melindungi diri dari infeksi, sebagian kelompok populasi berhasil meneruskan hidup berdampingan dengan SARS-CoV-2.

Sementara, sebagian lagi yang rentan dan sebenarnya membutuhkan keberpihakan kebijakan lebih besar, kemungkinan meninggal dunia atau terpaksa hidup dengan ancaman dan konsekuensi kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Momentum presidensi G20 tahun ini juga seharusnya menjadi modal kuat pemerintah memperbaiki dan memperkuat kebijakan kesehatan nasional. “Salah satu yang kami tekankan adalah pentingnya sinergi antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Keuangan saat menyusun skenario pembiayaan kesiapan dan respons pandemi di *Joint Finance-Health Task Force* G20. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *check and balance* antar dua kementerian, untuk memastikan semua instrumen G20 dapat dioptimalkan untuk perbaikan kebijakan nasional,” ujar Diah Saminarsih, Penasihat Senior Urusan Gender dan Pemuda untuk Dirjen WHO dan Pendiri CISDI.

“Posisi Indonesia sebagai Presiden G20 di era pandemi, berpotensi membawa pentingnya suara *vaccine equity*,” Diah melanjutkan. “Pada surat terbukanya kepada para kepala negara G20, Direktur Jenderal WHO meminta agar G20 mengedepankan isu keadilan vaksin dalam agendanya di tahun 2022. Surat tersebut menggarisbawahi pentingnya suara G20 untuk meningkatkan suplai vaksin bagi negara-negara yang sulit mengakses, memastikan vaksin tersedia bagi seluruh warga negara dunia, dan mendukung negara berpendapatan ke bawah dan menengah untuk menghadapi COVID-19 dengan sumber daya yang telah tersedia,” tuturnya.

Selain vaksin, diharapkan akses terhadap fasilitas kesehatan COVID-19 seperti alat diagnostik dan terapeutik juga tersedia bagi masyarakat yang sulit mengakses pelayanan kesehatan. “Setiap negara, terlepas dari status ekonomi masing-masing, harus mendapatkan akses terhadap fasilitas kesehatan ini. Untuk memastikan berjalannya mekanisme ini, negara-negara dunia juga perlu menyepakati kerangka kerja untuk mengantisipasi ketika kelangkaan fasilitas kesehatan terjadi. Inilah strategi yang bisa dipakai oleh Indonesia sebagai Presiden G20, khususnya untuk bidang kesehatan,” ujar Diah kembali.

Untuk mencegah ketimpangan penanganan wabah kembali berulang pada 2022, penanganan pandemi perlu ditempatkan dalam kerangka sistem kesehatan jangka panjang serta ditujukan untuk membantu mereka yang paling membutuhkan. Berikut **tujuh** langkah yang kami rekomendasikan:

- 1. Benahi kerangka regulasi dan tata kelola**

Pemerintah perlu mengatasi tumpang tindih regulasi, menguatkan koordinasi pusat dan daerah, mengembalikan mandat pengelolaan wabah dalam kerangka desentralisasi, dan membuka ruang keterlibatan unsur non-pemerintah dari berbagai latar belakang agar bias dan kesalahan pemikiran tidak lagi terulang.

- 2. Tempatkan pengendalian COVID-19 ke mekanisme pelayanan dan pembiayaan yang tidak terpisah dari sistem kesehatan**

Puskesmas sebaiknya dijadikan ujung tombak pelayanan kesehatan dan penanganan pandemi, misalnya dengan membiarkannya tetap menjadi sentra vaksinasi, termasuk untuk pemberian *booster* (dosis ketiga).

Berikan dukungan sejak sekarang bagi transformasi pelayanan kesehatan primer dalam bentuk anggaran, sumber daya manusia, dan regulasi. Bila ini dilakukan

konsisten, akan terbangun sistem kesehatan nasional dan pelayanan kesehatan primer yang transformatif dan tangguh setelah pandemi usai.

Sosialisasikan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk Omicron. Pemerintah bisa mengajak organisasi profesi dan jaringan masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan.

3. Sediakan akses tes COVID-19 secara universal baik di level fasilitas kesehatan dan komunitas untuk memutus rantai penularan varian Delta dan Omicron serta cegah mutasi baru

Mungkinkan puskesmas mendistribusikan RDT antigen kepada seluruh pengunjung klinik tanpa kecuali dan mengorganisir tes COVID-19 mandiri untuk setiap KK. Realokasikan anggaran untuk perkuat lacak dan isolasi, serta tingkatkan pelacakan dengan melibatkan kader kesehatan.

4. Perkuat kapasitas produksi dan distribusi vaksin

Perjelas strategi pencapaian target vaksin hingga 70-80% dosis lengkap, percepat jangkauan vaksinasi pada masyarakat rentan dan siapkan tata kelola untuk penyediaan dosis ketiga secara gratis bagi seluruh masyarakat.

Di samping itu, perjelas ketersediaan pasokan dan kapasitas layanan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga bagi lansia 65 tahun ke atas. Kuatkan jangkauan vaksinasi pada seluruh masyarakat dengan memobilisasi pelayanan kesehatan primer.

5. Sediakan terapi oral untuk pasien COVID-19

Melalui Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, BPOM, dan BPJS Kesehatan, upayakan kehadiran terapi oral COVID-19 dalam skema penanganan wabah nasional. Penyediaan terapi oral menuntut perbaikan kelembagaan, peningkatan kemampuan teknis, dan harmonisasi peraturan kementerian dan lembaga terkait yang bersifat jangka panjang.

6. Temukan kombinasi tepat dari intervensi berbasis kesehatan masyarakat

Mengingat kelelahan publik dan pelajaran dua tahun terakhir, menemukan kombinasi tepat intervensi berbasis kesehatan masyarakat menjadi sangat penting. Jalan tengah yang dapat diusahakan adalah meningkatkan akses dan kepatuhan penggunaan masker standar respirator, misalnya dengan menyediakan masker N95/FFP2/KN95 secara gratis.

Selain itu, tingkatkan intervensi kesehatan melalui fitur *telemedicine*, karantina ketat, dan PCR di bandara serta sampaikan komunikasi risiko secara konsisten dan dalam jangka panjang.

7. Berperan aktif sebagai negara yang percaya pada multilateralisme dan konsekuen mengadaptasi kesepakatan global

Kami menyerukan Indonesia tetap berpegang pada posisi politis dan skenario pendanaan pandemi sesuai *New International Treaty for Pandemic*. Perjanjian ini masih relevan untuk memutus rantai kesenjangan antara negara maju dan berkembang dalam meningkatkan kapasitas kesiapan dan respons terhadap pandemi.

Gunakan momentum presidensi G20 untuk mendorong berbagai isu negara berkembang yang muncul di tengah krisis, menjaga komitmen multilateralisme, menjaga solidaritas global, dan juga memperbaiki kebijakan kesehatan di level nasional.

Kami berkeyakinan, semua pihak menginginkan keberhasilan penanganan pandemi dapat tercapai, kesiapan menghadapi kegawatdaruratan kesehatan dapat terbangun, dan terang akan terbit setelah kegelapan.

-
1. Unduh dokumen rekomendasi kebijakan [di sini!](#)

-SELESAI-

Tentang CISDI

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah think tank yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat. CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata.

Informasi lebih lanjut, sila hubungi:

Amru Sebayang

Content & Media Officer

0877-8273-4584

Email: communication@cisdi.org www.cisdi.org